

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II TAHUN 2024 AUDITED

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI TENGAH**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

LAPORAN KEUANGAN

**UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
AUDITED TAHUN 2024**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI TENGAH**

Jl. Poros Palu Kulawi Km 17 Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi Sulawesi Tengah

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan Unaudited ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sgt. 05 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran ,

Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.SI
NIP. 19691112 199903 2 001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - B.2. Belanja
 - B.3. Belanja Pegawai
 - B.4. Belanja Barang
 - B.5. Belanja Modal
 - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - B.5.2. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - C.1.2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
 - C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
 - C.1.4. Persediaan
 - C.2. Aset Tetap
 - C.2.1. Tanah
 - C.2.2. Peralatan dan Mesin
 - C.2.3. Gedung dan Bangunan
 - C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.3. Piutang Jangka Panjang
 - C.4. Aset Lainnya
 - C.4.1. Aset Tak Berwujud
 - C.4.2. Aset Lain-lain
 - C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

- C.5. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.5.1. Uang Muka dari KPPN
- C.6. Ekuitas
 - C.6.1. Ekuitas
- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan
 - D.6. Beban Perjalanan Dinas
 - D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
 - D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH

JALAN POROS PALU KULAWI KM 17 MAJU KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI SULAWESI TENGAH 94381
WEBSITE : sulteng.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sulteng@pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan *Unaudited* Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan *Anunaudited* tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sigi, 05 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si

NIP. 19691125 199903 2 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan *Unaudited* Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah Semester II Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara Semester II pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 255.778.553,00 atau mencapai 341 % dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 75.000.000.00

Realisasi Belanja Negara pada periode Semester II TA 2024 adalah sebesar Rp. 7.424.675.325.00 atau mencapai 96.36 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.887.580.000.00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.73.245.559.418.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.96.960.250.00; Aset Tetap (neto) sebesar 72.690.032.570.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 458.566.598,.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.14.234.726,00 dan Rp.73.231.324.692.00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, *surplus/defisit* dari operasi, *surplus/defisit* dari kegiatan non operasional, *surplus/defisit* sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 138.163.081.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 8.429.413.496.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-8.291.250.415.00 Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp.219.782.472.00 dan Defisit Rp0.00

sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-8.071.467.943,00

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 74.702.160.863.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-8.071.467.943.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-568.865.000.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 7.169.496.77.00 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.73.231.324.692,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya, yaitu unsur unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 3 Desember 2024.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Semester II TA 2024

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2024			31 DESEMBER 2023
		Estimasi Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	75.000.000,00	255.778.553,00	341,00	183.862.921,00
Jumlah Pendapatan		75.000.000,00	255.778.533,00	341,00	183.862.921,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	3.111.997.000,00	3.065.781.776,00	99,00	3.389.422.607,00
Belanja Barang	B.4.	4.775.583.000,00	4.358.893.549,00	91,00	3.831.391.846,00
Belanja Modal	B.5.	0,00	0,00	0,00	1.715.711.650,00
Jumlah Belanja		7.887.580.000,00	7.424.675.325,00	94,00	8,936,526,103,00

II. NERACA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 dan 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0.00	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2.	0.00	0.00
Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	108.692.000.00	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.4.	108.692.000.00	0.00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.5.	0.00	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.6.	-15.337.750.00	0.00
Persediaan	C.1.7.	3.606.000.00	671,432,000.00
Jumlah Aset Lancar		95.295.250.00	671,432,000.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	53.963.030.000.00	54.536.755,000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	12,544,535,297.00	12,544,535,297.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	19.256.059.732,00	17,540,348,082.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	2,626,796,102.00	2,626,796,102.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.5.		1,013,590,250.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-15.700.388.561	-14.763.082.222.00
Jumlah Aset Tetap		72.690.032.570.00	73.582.284.409,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	19,964,473.00	19,964,473.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.2.	00,00	808.582.320
Aset Lain-lain	C.4.3.	3,258,435,294.00	3,258,435,294.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.4.	-2.819.833.169,00	-2,777.302.813.00
Jumlah Aset Lainnya		458.566.598,00	1,309.679.274,00
Jumlah Aset		73.245.559.418,00	74.891.963.683,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	14.234.726,00	189,802,820.00
Hibah Yang Belum Disahkan	C.5.2.	00,00	00,00
Uang Muka dari KPPN	C.5.3.	00,00	00.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		00,00	189,802,820,00
Jumlah Kewajiban		14.234.726,00	189,802,820,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	73.231.325.692.00	74.702.160.863.00
Jumlah Ekuitas		73.231.325.692.00	74.702.160.863.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		73.245.559.418,00	74.891.963.683,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SULAWESI TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 dan 31
DESEMBER 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	138.163.081,00	183.862.921,00
JUMLAH PENDAPATAN		138.163.081,00	183.862.921,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2.	3.064.116.776,00	3.389.422.607,00
Beban Persediaan	D.3.	91.978.800,00	905.918.850,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.552.294.293,00	2.236.208.674,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	933.467.240,00	690.754.373,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	739.531.942,00	669.941.949,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	979.836.695,00	1.151.523.942,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	15.337.750,00	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.9.	52.850.000,00	34.656.000,00
JUMLAH BEBAN		8.429.413.496,00	9.078.426.395,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-8.291.250.415,00	- 8.894.563.474,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.	0,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12.	224.642.472,00	66.912.000,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13.	4.860.000,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		219.782.472,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT – LO		- 8.071.467.943,00	-8.827.651.474,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
(BPSIP) SULAWESI TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 dan 31 DESEMBER 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1.	74.702.160.863,00	70.245.126.155,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	- 8.071.467.943,00	- 8.827.651.474,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	- 568.865.000,00	- 32.256.000,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1.	4.860.000,00	- 32.256.000,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	- 573.725.000,00	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	7.169.496.772,00	13.316.942.182,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	- 1.470.836.171,00	4.457.034.708,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	73.231.324.692,00	74.702.160.863,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut BPSIP Sulawesi Tengah adalah UPT BSIP yang melaksanakan penerapan dan diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi. BPSIP berada dibawah BSIP dan bertanggungjawab kepada Kepala BPSIP Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala.

Berdasarkan Perpres No. 117 Tahun 2023 tugas BSIP adalah Menyelenggarakan Koordinasi Perumusan, Penerapan, dan Pemeliharaan,serta Harmonisasi Standar Instrumen di Bidang Pertanian.

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian.
2. Pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrument di bidang pertanian
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harminisasi standar instrument di bidang pertanian
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Sebagai Unit Kerja Eselon 1 baru di Kementerian Pertanian, BSIP melaksanakan Transformasi dan Reorientasi Manajemen (SDM, Kelembagaan); membangun dan meningkatkan Jejaring kerja sama, dan Reinvestasi Infrastruktur

Tugas dan Fungsi BPSIP Sulawesi Tengah

BPSIP Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi. Pelaksanaan tugas BPSIP Sulawesi Tengah dikoordinasikan oleh Kepala BBPSIP. Dalam melaksanakan tugas BPSIP Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi
- b. Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi kebutuhan satndar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi
- c. Pelaksanaan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi
- d. Pelaksanaan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi
- e. Pelaksanaan Penyusunan Model Penerapan dan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi
- f. Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Pertanian Spesifik Lokasi

- g. Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengolahan Data Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi
- h. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi
- i. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga BPSIP

BPSIP Sulawesi Tengah terdiri dari :

- a. Sub bagian Tata Usaha dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik Negara.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (ASET TETAP)/(SIMAK- BMN/ASET). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah menerapkan *basis akrual* dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. *Basis akrual* adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*value net realizable*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan

pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi DIPA terkait berkaitan dengan automatic adjustmet, blokir kegiatan, regulasi PNBP, deviasi halaman III DIPA, penambahan kegiatan, pengurangan anggaran PNBP. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	75.000.000,00	75.000.000,00
Jumlah Pendapatan	75.000.000,00	75.000.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.336.497.000,00	3.036.497.000,00
Belanja Lembur	75.500.000,00	75.500.000,00
Belanja Barang Operasional	1.436.370.000,00	1.448.070.000,00
Belanja Barang Non Operasional	867.786.000,00	1.014.713.000,00
Belanja Barang Persediaan	162.250.000,00	159.981.000,00
Belanja Jasa	404.400.000,00	298.005.000,00
Belanja Pemeliharaan	841.240.000,00	933.540.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	632.500.000,00	921.274.000,00
Jumlah Belanja	7.756.543.000	7.887.580.000

Revisi Dipa Tahun 2024

Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
Pagu Awal	3.411.997.000,-	4.344.546.000,-	0,00	7.756.543.000,-
Revisi 1	3.411.997.000,-	4.651.598.000,-	0,00	8.063.595.000,-
Revisi 2	3.411.997.000,-	4.651.598.000,-	0,00	8.063.595.000,-
Revisi 3	3.411.997.000,-	4.651.598.000,-	0,00	8.063.595.000,-
Revisi 4	3.411.997.000,-	4.651.598.000,-	0,00	8.063.595.000,-
Revisi 5	3.411.997.000,-	4.651.598.000,-	0,00	8.063.595.000,-
Revisi 6	3.411.997.000,-	4.651.598.000,-	0,00	8.063.595.000,-
Revisi 7	3.411.997.000,-	4.651.598.000,-	0,00	8.063.595.000,-
Revisi 8	3.411.997.000,-	4.651.598.000,-	0,00	8.063.595.000,-
Revisi 9	3.111.997.000,-	4.786.598.000,-	0,00	7.795.595.000,-
Revisi 10	3.111.997.000,-	4.775.583.000,-	0,00	7.887.580.000,-
Revisi 11	3.111.997.000,-	4.775.583.000,-	0,00	7.887.580.000,-
Revisi 12	3.111.997.000,-	4.775.583.000,-	0,00	7.887.580.000,-
Revisi 13	3.111.997.000,-	4.775.583.000,-	0,00	7.887.580.000,-

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar 138.163.081.00 atau mencapai 84,22% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.75.000.000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	72.920.000,00	87.496.200,00	119,98
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	10.440.000,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	2.080.000,00	1.529.882,00	73,55
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi	-	4.900.000,00	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	18.919.999,00	0,00
Pendapatan sewa pelatanan & Mesin	-	14.877.000,00	0,00
Jumlah	75.000.000,00	138.163.081,00	84,22

Realisasi Pendapatan TA 2024 pada LRA penerimaan negara mengalami kenaikan sebesar 84,22% dari 31 Desember 2023 dikarenakan adanya peningkatan dari penerimaan hasil penjualan dan pengelolaan BMN, hal ini disebabkan adanya peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan tarif PNBPN yang berlaku pada Kementerian Pertanian, ada pendapatan dari penjualan hasil pertanian non tarif, pendapatan atas sewa gedung dan bangunan, sewa ruang kelas, pendapatan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pihak ketiga, dan pendapatan atas penyetoran kembalian atas temuan Inspektorat Jenderal atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2023. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	87.496.200,00	180.572.200	-51,55
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.529.882,00	1.490.721	2,63
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi	4.900.000,00	1.800.000	172,22
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	18.919.999,00	-	0,00
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	10.440.000,00	-	0,00
Pendapatan sewa pelatanaan & Mesin	14.877.000,00	-	0,00
Jumlah	138.163.081,00	183.862.921	-24,85

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada Semester II TA.2024 adalah sebesar Rp. 7.424.675.325,00 atau 98,94% dari anggaran belanja sebesar Rp. 7.887.580.000.00. Realisasi Persentase 94,13% . Adanya dana blokir sebesar Rp. 383.170.000, pada belanja barang menyebabkan realisasi tidak dapat nilai 98,94%. Adapun Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA.2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2024

Uraian	TA. 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.111.997.000,00	3.067.447.317,00	98,51
Belanja Barang	4.775.583.000,00	4.358.893.549,00	91,27
Belanja Modal	-	-	0%
Total Belanja Kotor	7.887.580.000,00	7.426.340.86600	94,13
Pengembalian Belanja	0,00	1.665.541,00	0,00
Dana Blokir	383.170.000,00	-	0,00
Total	7.504.410.000,00	7.424.675.325,00	98,94

Dibandingkan dengan Tahun 2023, Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami penurunan sebesar 9,55% , hal ini disebabkan antara lain adanya pegawai yang mencapai usia pensiun dan adanya pegawai struktural yang kembali ke fungsional namun belum menerima tunjangan dikarenakan tunjangan fungsionalnya belum tersedia di aplikasi keuangan. Adapun belanja barang mengalami peningkatan sebesar 13,77%, sedangkan belanja modal tidak mendapatkan anggaran di tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	%
Belanja Pegawai	3.065.781.776,00	3.389.422.607,00	-9,55
Belanja Barang	4.358.893.549,00	3.831.391.846,00	13,77
Belanja Modal	-	1.715.711.650,00	-100,00
Total Belanja	7.424.675.325,00	8.936.526.103,00	-16,92

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar 3.064.116.776.00 dan Rp3.389.422.607.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar – 9,59% dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pengurangan gaji pegawai yang disebabkan oleh adanya pegawai yang sdh masuk usia pensiun.
2. Adanya pengurangan tunjangan fungsional pegawai yang beralih ke struktural.
3. Adanya pengurangan tunjangan fungsional karena belum tersedianya tunjangan fungsional tersebut diaplikasi gaji.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.988.658.776,00	3.313.981.607,00	-9,77
Belanja Lembur	75.458.000,00	75.441.000,00	0,02
Jumlah Belanja Kotor	3.064.116.776,00	3.389.422.607,00	-9,55
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	0,00
Jumlah Belanja	3.064.116.776,00	3.389.422.607,00	-9,55

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.4.358.893.549.00 dan Rp.5.547.103.496.00. Realisasi belanja barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 21,42%% dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pengurangan anggaran pada anggaran belanja modal.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.070.444.414,00	1.337.286.826,00	54,82
Belanja Barang Non Operasional	434.292.433,00	607.999.105,00	-28,57
Belanja Barang Persediaan	144.828.800,00	234.486.850,00	-38,24
Belanja Jasa	36.005.000,00	290.922.743,00	-87,62
Belanja Pemeliharaan	933.790.960,00	690.754.373,00	35,18
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	739.531.942,00	669.941.949,00	10,39
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	1.715.711.650,00	-
Jumlah Belanja Kotor	4.358.893.549,00	5.547.103.496,00	-21,42

B.5.BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp1.715.711.650.00 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2024 tidak mengalami penambahan dibandingkan TA 2023.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 DESEMBER 2024	Realisasi 31 DESEMBER 2023	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	1.715.711.650.00	330,51
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0.00	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	1.715.711.650.00	330,51
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	0,00	1.715.711.650.00	330,51

B.5.1. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp1.715.711.650.00 dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 tidak mengalami penambahan dibandingkan TA 2023.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 DESEMBER 2024	Realisasi 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	1.715.711.650.00	0
Jumlah Belanja Kotor	0,00	1.715.711.650.00	0
Pengembalian Belanja	0,00	0.00	0
Jumlah Belanja	0,00	1.715.711.650.00	0

B.5.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 tidak ada mengalami penurunan atau kenaikan, dikarenakan tidak ada alokasi dan untuk menjadi pembandingnya di TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 DESEMBER 2024	Realisasi 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0.00	0.00	0.00
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	0.00	0.00	0.00

B.5.3 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 tidak ada mengalami penurunan ataupun kenaikan dikarenakan tidak ada pembandingnya di TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Tidak adanya pengalokasian belanja modal untuk belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan.

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 DESEMBER 2024	Realisasi 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0.00	0.00	0.00
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	0.00	0.00	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP senilai Rp0.00 dan sisa TUP senilai Rp0.00 dan uang Jasa Giro bank Rp0,00 yang telah dipertanggungjawabkan atau telah disetorkan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) tanggal 29 Juni 2024 ke Kas Negara melalui pihak Bank Negara Indonesia per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024
Uang Tunai di Kas	0.00
Uang di Rekening Bank	0.00
Jumlah	0.00

C.1.2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
per 31 Desember 2024

No	Nama Debitur	31 Desember 2024
1.	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0.00
	Jumlah	0.00

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

Saldo piutang per 31 Desember 2025 adalah Rp. 108.692.000, terdiri atas piutang Pt. Socio Komunikasi Indonesia Rp. 14.877.000,- Piutang Fungsional ex.Peneliti Rp. 92.150.000 dan Piutang Kelebihan bayaran Tunjangan Umum sebesar Rp. 1.665.000,

Saldo Piutang
per 31 Desember 2024

Nama Debitur	Nilai Piutang
PT. Socio Komunikasi Indonesia (SKI)	14.877.000.00
Piutang Fungsional Ex Peneliti	92.150.000.00
Piutang Fungsional Umum	1.665.000,00
Jumlah	108.692.000.00

C.1.4. PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)

Total Piutang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 108.692.000,

C.1.5. Bagian ancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 15.337.750,00 yang mana berasal dari penyisihan piutang macet dari PT. Socio Komunikasi Indonesia sebesar Rp. 14.877.000, dan penyisihan piutang kurang lancar dari piutang kelebihan tunjangan fungsional peneliti sebesar Rp. 460.750,00.Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR
per 31 Desember 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Macet	14.877.000.00	100%	14.877.000.00
Kurang Lancar	92.160.000.00	0,5%	460.750,00
Jumlah	107.027.000.00		15.337.750.00

C.1.7. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing- masing sebesar Rp.3.606.000.00 dan 0.00. Persediaan merupakan Alat Tulis Kantor. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 DESEMBER 2024	31 Desember 2023
Alat Tulis Kantor	3.606.000,00	0.00
Bahan Baku (Benih Jagung Varietas Jakarin (FS) dan Lamuru (FS))	0,00	0.00
Jumlah	3.606.000,00	0.00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 53.963.030,000.00 dan Rp.54.536.755,000.00. Terdapat selisih kurang pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 573.725.000,- , dikarenakan adanya penghapusan BMN berupa tanah berdasarkan Persetujuan Hibah dari kementerian Pertanian Nomor :S.97/WKN.16/KNL/03/2020 TENTANG Persetujuan Hibah Barang Milik Negara tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Pertanian.

Perbandingan Tanah
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tanah	53.963.030,00	54.536.755.000,00
Jumlah	53.963.030,00	54.536.755.00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah tidak mengalami perubahan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 , adapun rinciannya

Perbandingan Peralatan Mesin
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tanah	12.544.535.297,00	12.544.535.297,00
Jumlah	12.544.535.297,00	12.544.535.297,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 19.256.059.732.00 dan Rp. 17.623.689.982.00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Gedung & Bangunan	19.256.059.732,00	17.623.689.982,00
Jumlah	19.256.059.732,00	17.623.689.982,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Mutasi tambah senilai Rp.1.632.369.750.00
2. Pengurangan adanya akumulasi penyusutan..

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah tidak mengalami mutasi tambah dan mutasi kurang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, adapun rinciannya sbb

Perbandingan Jalan, Irigasi dan Jaringan

per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tanah	2.626.796.102,00	2.626.796.102,00
Jumlah	2.626.796.102,00	2.626.796.102,00

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp1.013.590.250.00 .

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. - 15.700.388.561,00 Rp-14.763.082.222.00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	12.544.535.297,00	11.991.599.151,00	552.936.146,00
2.	Gedung dan Bangunan	19.256.059.732,00	2.800.172.415,00	15.251.608.810,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.626.796.102,00	908.616.995,00	1.718.179.107
Jumlah		34.427.391.131,00	15.700.388.561,00	15.700.388.561,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19,964,473.00 dan Rp19,964,473.00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud
per 31 DESEMBER 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	19,964,473.00
Jumlah	19,964,473.00

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah

masing-masing sebesar Rp3,258,435,294.00 dan Rp3,258,435,294.00. Aset Lain-

lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Juni 2024	3.258,435,294.00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0.00
Saldo per 31 DESEMBER 2024	3,258,435,294.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 DESEMBER 2024	-2.736.073.162.00
Nilai Buku per 31 DESEMBER 2024	522.362.132.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. Tidak ada mutasi tambah Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya
2. Mutasi pengurangan adanya penyusutan

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.- 2.819.833.169,00 dan Rp- 2.777.302.813.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	19.964.473,00	19.964.473,00	0.00
2.	Aset Lain-lain	3.258.435.294,00	2.799.868.696,00	458.566.598,00
Akumulasi Penyusutan		3.278.399.767,00	2.819.833.169,00	522.362.132.00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 14.234.726,- merupakan pembayaran listrik bulan Desember 2024 yang ditagihkan dan akan dibayarkan di awal bulan Januari 2025 .

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas periode per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 73.258.751.418,00 Rp. 74.702.160.863.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 138.163.081.00 dan Rp. 183.862.921.00 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	87.496.200,00	180.572.200	-44,64
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	10.440.000,00		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.529.882,00	1.490.721	2,63
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	18.919.999,00	-	0,00
Pendapatan sewa pelatanan & Mesin	14.877.000,00	-	0,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi	4.900.000,00	1.800.000	172,22
Jumlah	138.163.081,00	183.862.921	95,69

Pendapatan bersumber dari penyeteroran dan pemotongan SPM gedung dan bangunan yang berasal dari sewa rumah dinas, pendapatan penjualan hasil pertanian/perkebunan/peternakan, pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.065.781.776.00 dan Rp. 3.389.422.607.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 DESEMBER 2024	Realisasi 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.078.140.300,00	2.272.106.000,00	- 8,54
Beban Pembulatan Gaji PNS	29.529,00	31.447,00	- 6,10
Beban Tunj. Anak PNS	39.701.488,00	45.729.784,00	- 13,18
Beban Tunj. Beras PNS	99.287.820,00	122.172.540,00	- 18,73
Beban Tunj. Fungsional PNS	236.150.000,00	339.870.000,00	- 30,52
Beban Tunj. PPh PNS	23.606.217,00	11.808.286,00	99,91
Beban Tunj. Struktural PNS	25.740.000,00	15.120.000,00	70,24
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	130.676.400,00	149.789.550,00	- 12,76
Beban Tunjangan Umum PNS	36.200.000,00	38.835.000,00	- 11,07
Beban Uang Lembur	75.458.000,00	75.441.000,00	0,02
Beban Uang Makan PNS	259.814.000,00	318.519.000,00	- 18,43
Beban Gaji Pokok PPPK	47.579.800,00	-	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	922,00	-	-
Beban Tunj. Beras PPPK	1.086.300,00	-	-
Beban Tunj. Fungsional PPPK	7.020.000,00	-	-
Beban Uang Makan PPPK	6.956.000,00	-	-
Jumlah	3.064.116.776,00	3.389.422.607,00	-23,65

Beban belanja pegawai atas kompensasi yang diberikan dalam bentuk uang yang diberikan pada pegawai BPSIP Sulawesi Tengah yang berjumlah 36 orang yang terdiri Gol IV 7 orang, Gol III 24 orang dan Gol II 5 orang dan 1 orang PPPK. Penurunan persentase realisasi belanja pegawai disebabkan adanya pegawai yang sudah memasuki purnabakti, dan ada pegawai yang beralih ke fungsional namun belum bisa menerima tunjangan fungsional dikarenakan belum tersedianya anggaran untuk tunjangan fungsional Analis Parasarana dan Sarana Pertanian.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 91.978.800,00 dan Rp.905.918.850,00 dan. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 DESEMBER 2024	Realisasi 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0.00	34.656.000.00	-100,00
Beban Persediaan bahan baku	132.100,00	16.632.000.00	-99,21
Beban Persediaan konsumsi	91.846.700,00	234.486.850.00	-60,83
Beban persediaan lainnya		654.800.000.00	-100,00
Jumlah	91.978.800,00	905.918.850.00	-90,22

D.4. **Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.538.059.567,00 dan Rp2.236.208.674.00 Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 DESEMBER 2024	Realisasi 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
Beban Bahan	683.517.600,00	497.836.405,00	37,30
Beban Barang Non Operasional Lainnya	188.044.880,00	110.162.700,00	70,70
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	77.376.000,00	119.274.000,00	35,13
Beban Peralatan & Mesin	5.920.000,00	-	100,00
Beban Jasa Profesi	32.900.000,00	6.800.000,00	383,82
Beban Keperluan Perkantoran	1.197.547.984,00	1.153.013.576,00	3,86
Beban Langganan Listrik	184.342.553,00	219.130.150,00	15,88
Beban Langganan Telepon	55.985.000,00	59.992.593,00	6,68
Belanja Jasa Lainnya	3.105.000,00	5.000.000,00	37,90
Belanja Barang Operasional Lainnya	109.320.550,00	64.999.250,00	68,19
Jumlah	2.538.059.567,00	2.236.208.674,00	213,50

Beban barang dan jasa merupakan beban yang terjadi untuk mendukung kegiatan pengkajian di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.933.467.240.00 dan Rp. 690.754.373.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:Perbandingan Beban Pemeliharaan

per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 DESEMBER 2024	Realisasi 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	306.995.575,00	235.690.779,00	30,25
Beban Pemeliharaan Jaringan	56.799.810,00	5.999.300,00	846,77
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	569.671.855,00	449.064.294,00	26,86
Jumlah	933.467.240,00	690.754.373,00	35,14

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk mendukung kegiatan di BPSIP Sulawesi Tengah dalam rangka menunjang pelaksanaan tupoksi.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 739.531.942.00 dan Rp. 669.941.949.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 DESEMBER 2024	Realisasi 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	592.866.942,00	587.791.949,00	0,86
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	146.665.000,00	82.150.000,00	78,53
Jumlah	739.531.942,00	669.941.949,00	10,39

Beban perjalanan merupakan beban yang terjadi untuk mendukung kegiatan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

D.7. Beban Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban untuk diserahkan kepada masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 52.850.000,00 dan 34.656.000,00. Rincian beban untuk diserahkan kepada masyarakat 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 DESEMBER 2024	Realisasi 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
Beban Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	52.850.000,00	34.656.000,00	52,50
Jumlah	52.850.000,00	34.656.000,00	52,50

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 979.836.695,00 dan Rp. 1.151.523.942,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 DESEMBER 2024	Realisasi 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	428.091.760,00	394.610.428,00	8,64
Beban Penyusutan Irigasi	20.122.188,00	20.122.188,00	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	20.435.184,00	29.032.017,00	- 29,61
Beban Penyusutan Jaringan	57.965.964,00	57.965.964,00	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	42.530.356,00	42.718.240,00	- 0,44
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	410.691.760,00	607.075.105,00	- 32,35
Jumlah	979.835.695,00	1.151.523.942,00	- 171,68

Beban Penyusutan yang terdiri dari Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jembatan tertuang pada Aplikasi Simak bmn.

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.14.877.000,00 berasal dari piutang macet PT. Socio Komunikasi Indonesia (SKI) dan Rp.460.750,00 piutang kurang lancar atas piutang kelebihan tunjangan peneliti.

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Keg. Non Operasional TA.2024 & 2023 adalah sbb:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 DESEMBER 2024	Realisasi 31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0.00	0.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	4.860.000,00	66.912.000.00	365.00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0,00	0.00	0.000
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0.00	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	224.642.472,00	0.00	0.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Belj Pegawai TA. Yang Lalu	0,00	0.00	0.00
Jumlah	219.782.472,00	66.912.000.00	365.00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp74.702.160.863.00. dan Rp. 70.245.126.155,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp-8.071.467.943.00 dan Rp-8.827.651.474.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-568.865.000.00 dan Rp-32.256.000.00.

Rincian Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas per 31 Desember 2024.

Uraian	31 Desember 2024
Koreksi Nilai Asset Tetap Non Ravaluasi	573.725.000
Koreksi Nilai Persediaan	4.860.000
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	568.865.000

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.860.000.00 dan Rp0.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.169.496.772,00 dan Rp13.316.942.182.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024.

Uraian	31 Desember 2024
Ditagihkan ke entitas lain	7.424.675.325
Transfer masuk	600.000
Diterima dari entitas lain	255.778.553
Transaksi Antar Entitas	7.169.496.772

E.4.1. Kenaikan / Penurunan Ekuitas

Kenaikan / Penurunan Ekuitas pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp. -1.470.836.171,00 dan 31 Desember 2023 adalah Rp. 4.457.034.708,00

Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2024.

Uraian	31 Desember 2024
Ekuitas awal	- 8.071.467.943
Koreksi Nilai Asset Tetap Non Ravaluasi	- 568.865.000
Transaksi antar entitas	7.169.496.772
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	- 1.470.836.171

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing- masing sebesar Rp. 73.231.324692,00 dan Rp74.702.160.863.00 .

Rincian Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024.

Uraian	31 Desember 2024
Ekuitas awal	74.702.160.863
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	- 1.470.836.171
Ekuitas Akhir	73.231.324.692

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

1. PIUTANG KELEBIHAN TUNJANGAN FUNGSIONAL PENELITI

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan Koreksi Internal, terdapat koreksi pencatatan piutang bertambah Rp. 1.665.000,- per 31 Desember 2024 **Audited** menjadi Rp. 108.692.000,- Terdiri dari piutang PT. Socio Komunikasi Indonesia (SKI) sebesar Rp. 14.877.000,- , Piutang Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional umum sebesar Rp. 1.665.000, dan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Peneliti sebesar Rp. 92.150.000.00. Adapun total piutang sesuai BAR Nomor: 212/KU.050/H.1.3/03/2024, tanggal 05 Maret 2024 adalah sebesar Rp. 101.650.000.00 dan telah dilakukan pembayaran dan penyetoran ke kas Negara sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 9.500.000.00. Rincian bukti setor kelebihan tunjangan fungsional peneliti sbb:

No	Nama	Total Kelebihan Tunjabfung	Total Setoran	Sisa
1	Dr.Ruslan Boy,SP.,Msi. Nip. 197203302007011001	18.780.000	3.000.000	15.780.000
2	Moh.Takdir,SPT.,MSc. Nip. 197710132008121001	20.345.000	3.000.000	17.345.000
3	Muchtar,SP.MP. Nip. 197911162008011008	10.980.000	2.000.000	8.980.000
4	Muh.Afif Juradi,SP.MP. Nip.198305242009121001	11.050.000	0	11.050.000
5	Muh.Abid,SP. Nip.198011262009121001	11.050.000	0	11.050.000
6	Irwan S.Padang ,SP.MSc. Nip.197607122011011004	7.280.000	0	7.280.000
7	Hamka Biolan,SP. Nip.197803112011011005	7.280.000	0	7.280.000
8	Tina Febrianti,SP.MSc. Nip.198202182008122002	11.895.000	1.000.000	10.895.000
9	Nurmasita Ismail,SP.Msi. Nip.198210232009122001	2.990.000	500.000	2.490.000
Jumlah		101.650.000	9.500.000	92.150.000

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 (Audited)

2. LAPORAN CAPAIAN KINERJA SATKER

Kementerian/Lembaga : (018) Kementerian Pertanian

Unit Organisasi : (09) Badan Standardisasi Pertanian

Satuan Kerja : (567673) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6916.ADA	Standarisasi Produk								
6916.ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifikasi Lokasi yang dibutuhkan, 1.0 Standar	82.000.000	81.568.500	99,47	1	1	SNI	100	
6916.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	535.000.000	534.433.110	99,89	500	1.055	orang	211	
6916.BDB.101	Lembaga Penerap standar yang didampingi	200.000.000	199.866.270	99,93	1	1	Lembaga	100	
6915.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup								
6915.CAG.101	Produk Instrumen Tanam Pangan Terstandar	600.000.000	574.406.780	95,73	20,5	unit	Ton	20,5	hasil 12 ton benihbenih jagung dan 6 ton benih padi, 2,5 ton processing
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
6918.EBA.956	Layanan BMN	54.003.000	28.302.250	52,41	1	1	Layanan	100	Dana Blokir Rp.25.600.000,- Dana Blokir Rp.107.700.000,-
6918.EBA.962	Layanan Umum	236.673.000	128.638.492	54,35	1	1	Layanan	100	
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	5.749.607.000	5.677.736.644	98,75	1	1	Layanan	100	
6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								
6918.EBD.952	Layanan Perencanaan & Penganggaran	249.672.000	141.933.670	56,85	1	1	Layanan	100	Dana Blokir Rp.107.654.000,- Dana Blokir Rp.27.795.000,- Dana Blokir Rp.93.373.000,-
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan & Evaluasi	56.198.000	28.402.700	50,54	1	1	Layanan	100	
6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	124.427.000	31.052.450	24,96	1	1	Layanan	100	

3. PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN PADA LRA DAN BEBAN PADA LO

KODE AKUN	NAMA AKUN	REALISASI ANGGARAN PADA LRA	BEBAN PADA LO
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.078.140.300	2.078.140.300
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.529	29.529
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	130.676.400	130.676.400
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	39.701.488	39.701.488
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25.740.000	25.740.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	236.150.000	236.150.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	23.606.217	23.606.217
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	99.287.820	99.287.820
511129	Belanja Uang Makan PNS	259.814.000	259.814.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	34.535.000	34.535.000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	47.579.800	47.579.800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	922	922
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.020.000	7.020.000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.086.300	1.086.300
511628	Belanja Uang Makan PPPK	6.956.000	6.956.000
512211	Belanja Uang Lembur	75.458.000	75.458.000
521111	Beban Keperluan Perkantoran	1.197.547.984	1.249.797.984
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	77.376.000	77.376.000
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	109.320.550	109.320.550
521211	Beban Bahan	683.517.600	644.219.100
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	188.044.880	182.764.880
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	5.920.000	p-
522111	Beban Langganan Listrik	198.577.279	184.342.553
522112	Beban Langganan Telepon	55.985.000	55.985.000
522151	Beban Jasa Profesi	32.900.000	32.900.000
522191	Beban Jasa Lainnya	3.105.000	3.105.000
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	306.995.575	306.995.575
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	569.671.855	569.671.855
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	56.799.810	56.799.810
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	592.866.942	592.866.942
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	146.665.000	146.665.000
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	410.691.760	-
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	428.091.243	-
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	20.435.184	-
591312	Beban Penyusutan Irigasi	20.122.188	-
591313	Beban Penyusutan Jaringan	57.965.964	-
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	42.530.356	-
593111	Beban Persediaan konsumsi	91.846.700	93.152.800
593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	52.850.000	52.930.500
593131	Beban Persediaan bahan baku	132.100	-
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-
594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	14.877.000	-
594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	460.750	-
	JUMLAH	8.431.078.496	7.424.675.325

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan (SNI)	1	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	20,5	20,5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	82	87,01
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	91,49	91,85

4.PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 297/Kpts/OT.050/M/06/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 265/Kpts/OT.050/M/06/2024 tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan pompanisasi, dan penambahan areal tanam padi gogo. Untuk mengatasi penurunan produksi pangan sekaligus menghadapi tantangan darurat pangan salah satunya menunjuk Kepala BBPSI Veteriner sebagai Penanggung Jawab Wilayah Sulawesi Tengah dengan tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pompanisasi dan penambahan areal tanam dengan dinas terkait, TNI, Polri dan petani; melaksanakan kegiatan pompanisasi dan penambahan areal tanam untuk peningkatan produksi padi di Sulawesi Tengah; melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan optimalisasi lahan, pompanisasi, dan penambahan areal tanam untuk peningkatan produksi padi serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pompanisasi dan penambahan areal tanam untuk peningkatan produksi padi setiap hari kepada Menteri melalui Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

**KEMAJUAN KEGIATAN
LUAS LAHAN POMPANISASI SAWAH TADAH HUJAN dan PERTAMBAHAN
AREAL TANAM PADI GOGO**

No	Kabupaten / Kota	Potensi Lahan STH yang dapat dipompanisasi (Ha)	Potensi Luas Areal Tanam Padi Gogo (Ha)	Realisasi Luas Tanam STH (Ha)	Persentase Realisasi %	Realisasi Padi Gogo (Ha)	Persentase realisasi Padi Gogo (%)	Total Luasan (Ha)	Total Capaian Realisasi (%)
1	Kab. Poso	964	1.678	3090,92	321%	758,33	45,19%	3849,25	145,69%
2	Kab. Donggala	0	1.604	714,5	-	1339	83,48%	2053,50	128,02%
3	Kab. Morowali Utara	3.069	411	3203	104,37%	1037	252,31%	4240,00	121,84%
4	Kab. Sigi	573	1.265	1213,59	211,80%	441,75	34,92%	1655,34	90,06%
5	Kab. Parigi Moutong	619	1.562	844,62	136,45%	436,85	27,97%	1281,47	58,76%
6	Kab. Tojo Una Una	717	1.678	245	34,17%	718,5	42,82%	963,50	40,23%
7	Kab. Banggai	1.047	2.938	1001,75	95,68%	506,55	17,24%	1508,30	37,85%
8	Kota Palu	17	103	16,999	99,99%	22	21,36%	39,00	32,50%
9	Kab. Morowali	276	404	193,27	70,03%	10	2,48%	203,27	29,89%
10	Kab. Toli Toli	478	1.111	361,665	75,66%	4,45	0,40%	366,12	23,04%
11	Kab. Buol	728	1.837	365,28	50,18%	96,904	5,28%	462,18	18,02%
12	Kab. Banggai Kepulauan	88	2.017	75,85	86,19%	4,3	0,21%	80,15	3,81%
13	Kab. Banggai Laut	0	569	0	-	13,29	2,34%	13,29	2,34%
		8576	17177	11326,44	132,07%	5388,924	31,37%	16715,37	64,91%

Kabupaten/Kota	Pompa Refocusing						Pompa ABT			Irigasi Pompa		Keterangan
	Kontrak	Tiba	Kirim	Belum Kirim	Distribusi Pada Petani	Telah digunakan oleh petani	ABT Usulan	ABT Diterima	ABT Digunakan	Irpm Usulan (Unit)	Irpm Digunakan (Unit)	
Kab. Poso	14	14	0	0	14	14	116	116	80	5	1	Uang telah ditransfer ke rekening kelompok tani
Kab. Donggala	2	2	0	0	2	2	41	41	38	2	2	Uang telah ditransfer ke rekening kelompok tani
Kab. Morowali Utara	0	0	0	0	0	0	263	263	261	9	9	Uang telah ditransfer ke rekening kelompok tani
Kab. Sigi	51	51	0	0	51	51	0	0	0	1	0	Uang telah ditransfer ke rekening kelompok tani
Kab. Parigi Moutong	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
Kab. Tojo Una Una	0	0	0	0	0	0	12	12	7			
Kab. Banggai	14	14	0	0	14	14	34	0	0	5	4	Uang telah ditransfer ke rekening kelompok tani
Kota Palu	4	4	0	0	4	4	4	4	Alokasi			
Kab. Morowali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	Uang telah ditransfer ke rekening kelompok tani
Kab. Toli Toli	0	0	0	0	0	0	7	7	7	8	0	Uang telah ditransfer ke rekening kelompok tani
Kab. Buol	32	32	0	0	32	32	207	147	134	14	0	Uang telah ditransfer ke rekening kelompok tani
Kab. Banggai Kepulauan	0	0	0	0	0	0	15	15	4			
Kab. Banggai Laut	0	0	0	0	0	0	36	36	0			
	117	117	0	0	117	117	735	641	532	50	22	

Pertanggal **17 Desember 2024**, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian merekap Wilayah Sulawesi Tengah telah mencapai total realisasi sebesar 64,91 % dengan rincian realisasi STH Pompanisasi seluas 11.326,44 ha dari target total 8.576 ha dan realisasi padi gogo seluas 5.388,92 ha dari target 17.177 ha yang sudah masuk di zona hijau yang sebelumnya masih di zona orange dari seluruh klaster 2 (10.000 – 70.000 ha). Serta rincian untuk setiap kabupatennya terkait dengan capaian luas lahan pompanisasi sawah tadah hujan dan penambahan areal tanam padi gogo dan realisasi pompa refocusing dan pompa ABT dijabarkan sebagai berikut :

PAT Pompanisasi dan Padi Gogo, Selasa, 17 Desember 2024 untuk Provinsi Sulawesi Tengah, sbb:

- Jml pesanan pompa refocusing: 117 unit
 - Real. pompa refocusing diterima: 117 unit
 - Jml pompa refocusing terpasang: 117 unit
 - Jml Usulan Pompa (ABT): 735 unit
 - Jml pompa diterima (ABT): 641 unit
 - Jml pompa ABT digunakan (ABT): 532 unit
 - Irigasi Perpompaan (IRPOM) dan konstruksi yang direalisasikan : 50 unit
 - Irpom termanfaatkan : 22 unit
- Ket: 28 unit belum termanfaatkan karena sementara dalam proses pekerjaan
- Luas PAT s/d hari ini: 11.326,44 ha (132,07%) dari target 8.576 ha
 - Luas padi gogo s/d hr ini: 5.388,92 ha (31,37%) dari target 17.177 ha

Dengan rincian per kabupaten/kota (13 kabupaten/kota) yang menjadi tanggung jawab Kepala

BBPSI Veteriner sebagai berikut:

1. Kabupaten Poso

- Jml pesanan pompa refocusing: 14 unit
 - Real. pompa diterima refocusing: 14 unit
 - Jml pompa terpasang refocusing: 14 unit
 - Jml pompa ABT digunakan (ABT): 80 unit
 - Irpom dan konstruksi yang direalisasikan (unit) : 5
 - Irpom termanfaatkan (unit): 1
- Ket: 4 unit belum termanfaatkan karena sementara dalam proses pekerjaan
- Luas PAT s/d hari ini: 3.090,92 ha (321%) dari target 964 ha
 - Luas padi Gogo s/d hr ini: 758,33 ha (45,19%) dari target 1.678 ha

2. Kabupaten Donggala

- Jml pesanan refocusing pompa: 2 unit
 - Real. Pompa refocusing diterima: 2 unit
 - Jml pompa refocusing terpasang: 2 unit
 - Jml Usulan Pompa (ABT): 41 unit
 - Jml pompa diterima (ABT): 41 unit
 - Jml pompa ABT digunakan (ABT): 38 unit
 - Irpom dan konstruksi yang direalisasikan (unit) : 2
 - Irpom termanfaatkan (unit): 2
- Luas PAT s/d hari ini: 714,5 ha
 - Luas padi Gogo s/d hr ini: 1.339 ha (83,48%) dari target 1.604 ha

3. Morowali Utara

- Jml pesanan pompa refocusing: 0 unit
- Real. pompa diterima refocusing: 0 unit
- Jml pompa terpasang refocusing: 0 unit

- Jml Usulan Pompa (ABT): 263 unit
- Jml pompa diterima (ABT): 263 unit
- Jml pompa ABT digunakan (ABT): 261 unit
- Irpom dan konstruksi yang direalisasikan (unit) : 9
- Irpom termamfaatkan (unit): 9
- Luas PAT s/d hari ini: 3.203 ha (104,37%) dari target 3.069 ha
- Luas padi Gogo s/d hr ini: 1.037 ha (252,31%) dari target 411 ha

4. Kabupaten Sigi

- Jml pesanan pompa refocusing: 51 unit
- Real. pompa diterima refocusing: 51 unit
- Jml pompa refocusing terpasang: 51 unit
- Luas PAT s/d hari ini: 1.213,59 ha (211,80%) dari target 573 ha
- Luas padi Gogo s/d hr ini: 441,75 ha (34,92%) dari target 1.265 ha

5. Parigi Moutong

- Jml pesanan pompa refocusing: 0 unit
 - Real. pompa diterima refocusing: 0 unit
 - Jml pompa refocusing terpasang: 0 unit
-
- Jml Usulan Pompa (ABT): 0 unit
 - Jml pompa diterima (ABT): 0 unit
 - Jml pompa ABT digunakan (ABT): 1 unit (Alokasi dari Kab. Palu)
-
- Luas PAT s/d hari ini: 844,62 ha (136,45%) dari target 619 ha
 - Luas padi Gogo s/d hr ini: 436,85 ha (27,97%) dari target 1.562 ha

7. Tojo Una-una

- Jml pesanan pompa refocusing: 0 unit
 - Real. pompa diterima refocusing: 0 unit
 - Jml pompa refocusing terpasang: 0 unit
-
- Jml Usulan Pompa (ABT): 12 unit
 - Jml pompa diterima (ABT): 12 unit
 - Jml pompa ABT digunakan (ABT): 7 unit
 - Luas PAT s/d hari ini: 245 ha (34,17%) dari target 717 ha
 - Luas padi Gogo s/d hr ini: 718,5 ha (42,82%) dari target 1.678 ha

8. Kabupaten Banggai

- Jml pesanan pompa refocusing: 14 unit
- Real. pompa diterima refocusing: 14 unit
- Jml pompa refocusing terpasang: 14 unit

- Jml Usulan Pompa (ABT): 34 unit
- Jml pompa diterima (ABT): 0 unit
- Jml pompa ABT digunakan (ABT): 0 unit
- Irpom dan konstruksi yang direalisasikan (unit) : 5
- Irpom

8. Kota Palu

- Jml pesanan pompa refocusing: 4 unit
- Real. pompa diterima refocusing: 4 unit
- Jml pompa terpasang refocusing: 4 unit
- Jml pompa ABT digunakan (ABT): 0 unit (Alokasi 1 unit ke Kab. Parigi Moutong)

- Luas PAT s/d hari ini: 16,999 ha (99,99%) dari target 17 ha
- Luas padi Gogo s/d hr ini: 22 ha (21,36%) dari target 103 ha

9. Morowali

- Jml pesanan pompa refocusing: 0 unit
- Real. pompa diterima refocusing: 0 unit
- Jml pompa terpasang refocusing: 0 unit

- Jml Usulan Pompa (ABT): 0 unit
- Jml pompa diterima (ABT): 0 unit
- Jml pompa ABT digunakan (ABT): 0 unit
- Irpom dan konstruksi yang direalisasikan (unit) : 6
- Irpom termanfaatkan (unit): 6

- Luas PAT s/d hari ini: 193,27 ha (70,03%) dari target 276 ha
- Luas padi Gogo s/d hr ini: 10 (2,48%) dari target 404 ha

10. Toli-Toli

- Jml pesanan pompa refocusing: 0 unit
- Real. pompa diterima refocusing: 0 unit
- Jml pompa terpasang refocusing: 0 unit

- Jml Usulan Pompa (ABT): 7 unit
- Jml pompa diterima (ABT): 7 unit
- Jml pompa ABT digunakan (ABT): 7 unit
- Irpom dan konstruksi yang direalisasikan (unit) : 8
- Irpom termanfaatkan (unit): 0

Ket: 8 unit belum termanfaatkan karena sementara dalam proses pekerjaan

- Luas PAT s/d hari ini: 361,665 ha (75,66%) dari target 478 ha
- Luas padi Gogo s/d hr ini: 4,45 ha (0,40%) dari target 1.111 ha

11. Kabupaten Buol

- Jml pesanan pompa refocusing: 32 unit
 - Real. pompa diterima refocusing: 32 unit
 - Jml pompa terpasang refocusing: 32 unit
-
- Luas PAT s/d hari ini: 365,28 ha (50,18%) dari target 728
 - Luas padi Gogo s/d hr ini: 96,904 ha (5,28%) dari target 1.837 ha

12. Banggai Kepulauan

- Jml pesanan pompa refocusing: 0 unit
 - Real. pompa diterima refocusing: 0 unit
 - Jml pompa terpasang refocusing: 0 unit
-
- Jml Usulan Pompa (ABT): 15 unit
 - Jml pompa diterima (ABT): 15 unit
 - Jml pompa ABT digunakan (ABT): 4 unit
-
- Luas PAT s/d hari ini: 75,85 ha (86,19%) dari target 88 ha
 - Luas padi Gogo s/d hr ini: 4,3 (0,21%) dari target 2.017 ha

13. Banggai Laut

- Jml pesanan pompa refocusing: 0 unit
 - Real. pompa diterima refocusing: 0 unit
 - Jml pompa terpasang refocusing: 0 unit
-
- Jml Usulan Pompa (ABT): 36 unit
 - Jml pompa diterima (ABT): 36 unit
 - Jml pompa ABT digunakan (ABT): 0 unit
-
- Luas PAT s/d hari ini: 0 ha
 - Luas padi Gogo s/d hr ini: 13,29 ha (2,34%) dari target 569 ha

REALISASI PETA POLYGON DATA GEOSPASIAL PERLUASAN AREAL TANAM (PAT) KOMODITAS PADI DAN PADI GOGO WILAYAH SULAWESI TENGAH

Sulawesi Tengah	12.838,67
Banggai	1.403,51
Banggai Kepulauan	74,45
Banggai Laut	10,38
Buol	396,05
Donggala	1.374,93
Kota Palu	35,42
Morowali	162,66
Morowali Utara	3.709,04
Parigi Moutong	1.083,92
Poso	2.109,60
Sigi	1.204,50
Tojo Una Una	883,48
Toli Toli	390,75

*Catatan : luasan yang belum terpolygon seluas 3.876,69/16.715,36 ha (per 25/11/2024

**DOKUMENTASI
PENDAMPINGAN DALAM PERCEPATAN PERLUASAN AREAL TANAM (PAT) &
MONITORING PROGRAM STRATEGIS DARURAT PANGAN KEMENTERIAN
PERTANIAN PERIODE BULAN NOVEMBER 2024**

fOto	Kegiatan
 <p>16 Nov 2024 09:58:32 -1.17354393 119.91593744 Sibowh Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah</p>	<p>Tanggal 12 – 17 November 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan tanam PAT padi di Kec. Tawaeli Kota Palu • Monitoring pertanaman PAT Padi di Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala • Monitoring pertanaman PAT padi dan pemanfaatan mesin pompa air di Kec. Pamona Utara Kab. Poso • Gerakan pertanaman PAT
 <p>27 Nov 2024 13:42:57 -119.85416398 Jl Alkautsar Pengawu Palu Selatan Palu City Central Sulawesi</p>	<p>Tanggal 26 – 27 November 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring persiapan tanam PAT di Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala • Panen PAT padi di Kel. Pengawu, Kec. Tatangga Kota Palu

KENDALA

Realisasi pemanfaatan bantuan pompa ABT di Provinsi Sulawesi Tengah masih rendah antara lain pada 2 kabupaten yaitu di Kabupaten Poso yaitu 80 unit pompa terpasang dari 116 unit pompa yang diterima dan Kabupaten Buol yaitu 134 unit pompa terpasang dari 147 unit pompa yang diterima.

ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

Seluruh pihak yang terkait seperti para LO BSIP Sulteng dan para penyuluh serta petani dapat bersinergi dalam pemanfaatan pompa yang telah diusulkan dan di

5. Menindaklanjuti hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor R.377/PW.130/G.5/12/2024, tanggal 16 Desember 2024 atas kelebihan pembayaran pada pengelolaan Anggaran TA 2023 pada Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah yaitu pada belanja bahan sebesar Rp. 63.130.454,- dan belanja modal berupa kekurangan pengenaan denda senilai Rp. 1.261.333,-. Adapun kekurangan pengenaan denda telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara dengan bukti NTPN No.3898E55DFA1H8BNL tanggal 30 Desember 2024.
6. Terdapat belanja listrik bulan Desember 2024 yang masih harus dibayarkan dibulan Januari 2025 sebesar Rp. 14.234.726, . Nilai sudah dijurnal pada 31 Desember 2024, yang didalam neraca merupakan utang pada pihak ketiga.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Pegawai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah mempunyai Jumlah dan Komposisi Pegawai per 30 Juni 2024 sebanyak 37 Pegawai yang terdiri sebagai berikut :

1. Kepala Balai
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Fungsional Asta (Analisis Standar) 2 orang
 - a. Analisis Asta Ahli Muda sebanyak 1 Orang
 - b. Analisis Asta Ahli Pertama sebanyak 1 Orang
4. Kelompok Penyuluh 10 orang
 - a. Penyuluh Pertanian Ahli Madya Golongan IV sebanyak 4 orang
 - b. Penyuluh Pertanian Ahli Muda Golongan III sebanyak 4 orang
 - c. Penyuluh Pertanian Ahli Pertama Golongan III sebanyak 2 orang
5. Kelompok Fungsional Pengawas Benih 6 orang
 - a. Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama Golongan III 2 Org
 - b. Fungsional Pengawas Benih Tanaman Mahir Gol III sebanyak 1 orang
 - c. Fungsional Pengawas Benih Tanaman Terampil Gol II sebanyak 3 orang
6. Kelompok Fungsional POPT Ahli Pertama sebanyak 1 orang
7. Fungsional Analisis Prasarana dan Sarana Ahli Muda sebanyak 1 orang
8. Kelompok Fungsional Umum 12 orang
9. Fungsional Analisis SDM Aparatur Ahli Madya Golongan IV sebanyak 1 orang
10. Fungsional Pustakawan Golongan III sebanyak 1 orang
11. Kelompok Fungsional Keuangan 2 orang
 - c. Fungsional PK APBN Terampil Golongan II sebanyak 1 orang
12. Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama (PPPK) sebanyak 1 orang

Sigi, 05 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si
NIP. 19691125 199903 2 001